



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. MU'MINUN, M.M**
Jabatan : **KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK,**
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PEMALANG

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MANSUR HIDAYAT**
Jabatan : **BUPATI PEMALANG**

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pemalang, 14 Januari 2025

Pihak Kedua,

BUPATI PEMALANG

MANSUR HIDAYAT

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN
PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PEMALANG

Drs. MU'MINUN, M.M

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PEMALANG

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2025	TW.1	TW.2	TW.3	TW.4
1.	Menurunkan angka kelahiran pada kelompok usia tertentu	Total Fertility Rate (TFR)	Angka	2,23	0,00	0,00	0,00	2,47
		ASFR (15-19 tahun)	Angka	21,20	0,00	0,00	0,00	34,00
		Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern contraceptive prevalence (mCP)	%	70,75	0,00	0,00	0,00	70,75
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	9,78	0,00	0,00	0,00	9,78
2.	Meningkatkan pemberdayaan gender	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,425	0,00	0,00	0,00	0,425
3.	Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan	Indeks PUG/Penghargaan APE	Nilai	Utama	0,00	0,00	0,00	Utama
4.	Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak	Indeks PA/Penghargaan KLA	Nilai	Nindya	0,00	0,00	0,00	Nindya
5.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan penanganan PMKS	% PMKS yang ditangani	%	66,60	0,00	0,00	0,00	66,60
6.	Meningkatnya pemberdayaan, pemberian jaminan perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial pada penduduk yang terdaftar di DTKS	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	100	0,00	0,00	0,00	100
		Persentase korban bencana alam dan sosial perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	%	100	0,00	0,00	0,00	100
7.	Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Layanan Urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	Indeks	86,27	-	86,27	-	86,27
		Nilai SAKIP	Nilai	65,36	-	-	65,36	-

NO	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	KETERANGAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.370.250.000	DAU
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	296.978.000	DAU
3.	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	11.925.000	DAU
3.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	4.483.177.800	DAU
4.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	437.395.000	DAU
5.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	250.000.000	DAU
6.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	15.000.000	DAU
7.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	117.500.000	DAU
8.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	444.850.000	DAU + DAK
9.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	210.000.000	DAU
10.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	20.000.000	DAU
11.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	168.500.000	DAU
12.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	167.810.000	DAU + DAK
13.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	9.554.057.000	DAU + DAK
14.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	7.819.654.000	DAU + DAK
15.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	873.940.000	DAU + DAK
JUMLAH		32.241.036.800	

Pemalang, 14 Januari 2025

Pihak Kedua,

BUPATI PEMALANG



MANSUR HIDAYAT

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PEMALANG



Drs. MU'MINUN, M.M



PERJANJIAN KINERJAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FATKHUROKHMAN,SH.,M.Si**
Jabatan : **Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **SUPADI, AKS, M.H**
Jabatan : **Sekretaris Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Sekretaris Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak


SUPADI, AKS, M.H

Pemalang, 2 Januari 2025
Pihak Pertama,
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian


FATKHUROKHMAN,SH.,M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Triwulan			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	50	0	0	0	50
2	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	1
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	1
4	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	1	0	0	0	1
5	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	1
6	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	1
7	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	0	0	0	1
8	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	250	0	0	0	250

9	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	4	0	0	0	4
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	5	0	0	0	5
11	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	0	0	0	12
12	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	0	0	0	12
13	Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	0	0	0	1
14	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	0	0	0	1
15	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	99	0	0	0	99
16	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	0	0	0	2

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	31.756.400,00	0,00	0,00	0,00	31.756.400,00
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.098.480,00	7.672.500,00	0,00	0,00	6.425.980,00
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	91.176.000,00	91.176.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.689.585,00	10.087.000,00	0,00	0,00	5.602.585,00
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.051.900,00	33.051.900,00	0,00	0,00	0,00
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.240.600,00	16.240.600,00	0,00	0,00	0,00
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	153.446.000,00	70.825.000,00	0,00	0,00	82.621.000,00
9	Pengadaan Mebel	50.342.115,00	50.342.115,00	0,00	0,00	0,00
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.240.000,00	42.915.000,00	0,00	0,00	6.325.000,00
11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	45.000.930,00	26.022.018,00	0,00	0,00	18.978.912,00
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	129.101.000,00	105.100.000,00	0,00	0,00	24.001.000,00
13	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.040.000,00	10.308.000,00	0,00	0,00	9.732.000,00

14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	699.528.000,00	174.882.000,00	174.882.000,00	174.882.000,00	174.882.000,00
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	138.970.990,00	75.095.000,00	0,00	0,00	63.875.990,00
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	127.920.000,00	127.920.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.628.002.000,00	854.037.133,00	174.882.000,00	174.882.000,00	424.200.867,00

Pihak Kedua,
 Sekretaris Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk,
 Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
 dan Perlindungan Anak




SUPADI, A.K.S., M.H

Pemalang, 2 Januari 2025
 Pihak Pertama
 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian



FATKHUROKHMAN, SH, MSi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HERSISWATI NUR ALIFAH, SH.**
Jabatan : **Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **SUPADI, AKS, M.H.**
Jabatan : **Sekretaris Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pemalang, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak


SUPADI, AKS, M.H

Pihak Pertama,
Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan


HERSISWATI NUR ALIFAH, SH.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN BINA PROGRAM DAN KEUANGAN

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Triwulan			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	0	0	0	6
2	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	0	0	0	2
3	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evakuasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	0	0	3	0
4	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	29	0	0	0	29
5	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	0	0	0	1
6	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	0	0	0	1
7	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	6	0	0	0	6

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	✓ 187.346.000,00	3.396.000,00	55.806.500,00	7.175.000,00	120.968.500,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	✓ 13.457.000,00	379.000,00	9.821.000,00	2.000.000,00	1.257.000,00
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	✓ 25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	✓ 5.442.248.000,00	1.086.088.950,00	1.822.680.200,00	783.367.200,00	1.750.111.650,00
7	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	✓ 45.539.500,00	0,00	0,00	0,00	45.539.500,00
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	✓ 6.295.500,00	0,00	0,00	0,00	6.295.500,00
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	✓ 22.362.000,00	0,00	22.105.000,00	0,00	257.000,00
TOTAL		5.742.248.000,00	1.089.863.950,00	1.910.412.700,00	792.542.200,00	1.949.429.150,00

Pemalang, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak




SUPADI, AKS, M.H

Pihak Pertama,
Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan


HERSISWATI NUR ALIFAH, SH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUPADI, AKS, M.H**
Jabatan : **Sekretaris Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. MU'MINUN, M.M**
Jabatan : **Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pemalang, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


Drs. MU'MINUN, M.M


SUPADI, AKS, M.H

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Jumlah
1	Terlaksananya Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Keuangan	Nilai SAKIP	Nilai	61,10
		Nilai IRB	Nilai	62,00
2	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan akuntabel	Dokumen	11
3	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan akuntabel	Dokumen	9
4	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	Orang	50
5	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Layanan	7
6	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	4
7	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Jasa	4
8	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	Unit	101

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	225.803.000,00	4.539.000,00	157.660.000,00	10.978.500,00	52.625.500,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.516.445.000,00	1.087.300.950,00	1.853.729.200,00	784.815.200,00	1.790.599.650,00
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	31.756.400,00	0,00	0,00	0,00	31.756.400,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	336.102.565,00	336.102.565,00	0,00	0,00	0,00
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	99.582.115,00	0,00	0,00	0,00	99.582.115,00
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	893.669.930,00	267.729.282,00	145.798.500,00	145.798.500,00	334.343.648,00
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	266.890.990,00	266.890.990,00	0,00	0,00	0,00
Total Anggaran		7.370.250.000,00	1.962.562.787,00	2.157.187.700,00	941.592.200,00	2.308.907.313,00

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Drs. MU'MINUN, M.M

Pemalang, 2 Januari 2025
Pihak Pertama,
Sekretaris Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

SUPADI, AKS, M.H.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dra. ROKHILAH, M.M**
Jabatan : **Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. MU'MINUN, M.M**
Jabatan : **Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pemalang, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak



Drs. MU'MINUN, M.M

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

Dra. ROKHILAH, M.M

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIDANG REHABILITASI SOSIAL

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Jumlah
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi	Orang	239
2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya BUKAN Korban HIV / AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial yang di Rehabilitasi	Orang	12

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	4.176.200.000,00	0,00	0,00	3.791.647.000	384.553.000
2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	306.977.800,00	0,00	0,00	173.879.500	133.098.300
Total Anggaran		4.483.177.800	0,00	0,00	3.965.526.500	517.651.300

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak



Drs. MU'MINUN, M.M

Pemalang, 2 Januari 2025
Pihak Pertama,
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial


Dra. ROKHILAH, M.M

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
BIDANG REHABILITASI SOSIAL (SUB KEGIATAN)

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Triwulan			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Terlaksananya Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	280	0	280	0	0
2	Terlaksananya Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	0	100	0	0
3	Terlaksananya Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	0	20	0	0
4	Terlaksananya Pemberian Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	44	0	44	0	0
5	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	815	0	0	0	815
6	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan, Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1867	0	1867	0	0

7	Terlaksananya Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	150	0	150	0	0
8	Terlaksananya Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	180	0	0	0	180
9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	76	0	0	0	76
10	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	22	0	22	0	0
11	Terlaksananya Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30	0	0	0	30
12	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	83	0	83	0	0
13	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	12	0	0	0	12
14	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	0	0	0	100

15	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1031	0	1031	0	0
16	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Orang	2	0	0	0	2

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Penyediaan Permakanan	277 709 000,00	2 070 000,00	52 200 000,00	223 439 000,00	0,00
2	Penyediaan Sandang	84 150 000,00	6 040 000,00	78 110 000,00	0,00	0,00
3	Penyediaan Alat Bantu	22 870 700,00	1 059 800,00	21 810 900,00	0,00	0,00
4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	30 922 100,00	9 221 200,00	21 700 900,00	0,00	0,00
5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	298 880 800,00	158 526 000,00	15 500 000,00	124 854 800,00	0,00
6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	2 684 325 000,00	0,00	2 684 325 000,00	0,00	0,00
7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	49 422 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00	40 422 000,00	0,00
8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	324 812 100,00	324 812 100,00	0,00	0,00	0,00
9	Pemberian Layanan Data dan Pangaduan	146 108 000,00	146 108 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Pemberian Layanan Kedaruratan	87 813 200,00	6 034 800,00	81 778 400,00	0,00	0,00
11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	3 980 000,00	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Pemberian Layanan Rujukan	165 207 100,00	10 120 000,00	2 610 000,00	5 176 200,00	147 300 900,00
13	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	37 852 800,00	37 852 800,00	0,00	0,00	0,00
14	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	21 400 000,00	0,00	14 060 000,00	7 340 000,00	0,00

15	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	91.725.000,00	0,00	0,00	68.611.000,00	23.114.000,00
16	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	156.000.000,00	21.787.500,00	21.283.500,00	21.283.500,00	91.645.500,00
Total Anggaran		4.483.177.800,00	730.612.200,00	2.999.378.700,00	491.126.500,00	262.060.400,00

Pemalang, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial



Drs. MU'MINUN, M.M

Dra. ROKHILAH, M.M



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YUSTINA DWI MEININGTIAS, SKM, M.Kes**
Jabatan : **Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. MU'MINUN, M.M**
Jabatan : **Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pemalang, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Drs. MU'MINUN, M.M

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial

YUSTINA DWI MEININGTIAS, SKM, M.Kes

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
BIDANG PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL (SUB KEGIATAN)

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Triwulan			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30	0	0	0	30
2	Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	14	14	14	14	14
3	Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	250	0	0	0	250
4	Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	65	0	0	0	65
5	Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga LK3	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Sertifikat	15	0	0	0	15
6	Terlaksananya Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak- Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	0	5	0	0

7	Terlaksananya Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak- Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	0	5	0	0
8	Terlaksananya Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak- Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	120	0	120	0	0
9	Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	45000	0	45000	0	0
10	Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	45000	0	45000	0	0
11	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	30	0	0	0	30
12	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	0	0	0	10
13	Terlaksananya Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	225	225	0	0	0
14	Terlaksananya Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	225	0	225	0	0
15	Terlaksananya Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit	3	3	0	0	0

16	Terlaksananya Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	35	35	0	0	0
17	Terlaksananya Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	40	40	0	0	0
18	Terlaksananya Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampung	1	0	1	0	0
19	Terlaksananya Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	40	0	40	0	0
20	Terlaksananya Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dokumen	1	0	0	0	1
21	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Makam	1	0	0	0	1

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	16.604.500,00	16.604.500,00	0,00	0,00	0,00
2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	220.608.000,00	57.537.000,00	54.674.000,00	54.674.000,00	53.723.000,00
3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	45.075.500,00	45.075.500,00	0,00	0,00	0,00
4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	12.376.000,00	1.949.000,00	5.620.000,00	4.807.000,00	0,00
5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga LK3	2.314.000,00	0,00	0,00	2.314.000,00	0,00
6	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	2.675.000,00	300.000,00	700.000,00	1.675.000,00	0,00
7	Rujukan Anak-Anak Terlantar	6.180.500,00	2.680.000,00	2.304.400,00	1.196.100,00	0,00
8	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	33.441.700,00	1.702.500,00	712.000,00	31.027.200,00	0,00
9	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	310.025.300,00	46.866.000,00	6.770.000,00	6.320.800,00	250.068.500,00
10	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	39.999.800,00	13.996.500,00	26.003.300,00	0,00	0,00
11	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	42.941.700,00	30.000.000,00	0,00	12.941.700,00	0,00
12	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	2.131.000,00	0,00	2.131.000,00	0,00	0,00
13	Penyediaan Makanan	51.450.000,00	0,00	0,00	51.450.000,00	0,00
14	Penyediaan Sandang	98.550.000,00	0,00	0,00	98.550.000,00	0,00

15	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	4.586.000,00	0,00	4.586.000,00	0,00	0,00
16	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	9.864.400,00	0,00	9.864.400,00	0,00	0,00
17	Pelayanan Dukungan Psikososial	13.931.600,00	0,00	13.931.600,00	0,00	0,00
18	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	44.108.100,00	2.724.500,00	2.677.400,00	1.290.000,00	37.416.200,00
19	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	27.509.900,00	6.564.500,00	4.985.000,00	5.325.600,00	10.634.800,00
20	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	8.235.000,00	0,00	0,00	8.235.000,00	0,00
21	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	6.765.000,00	0,00	0,00	0,00	6.765.000,00
Total Anggaran		999.373.000	226.000.000	134.959.100	279.806.400	358.607.500

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak



Drs. MU'MINUN, M.M

Pemalang, 2 Januari 2025
Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial

YUSTINA DWI MEININGTIAS, SKM., M.Kes

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIDANG PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Jumlah
1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota yang meningkat kapasitas/potensinya	%	36,12
2	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terdaftar di DTKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	Orang	10
3	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terupdatenya Data Fakir miskin	Dokumen	1
4	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana skala Kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100
5	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah desa rawan bencana yang di fasilitasi kesiap siagakan bencana	desa	1
6	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase taman makam pahlawan dalam kondisi baik	%	100

No	Sasaran Kegiatan	Anggaran (Rp)	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	296.978.000,00	166.814.000,00	130.164.000,00	0,00	0,00
2	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	42.297.200,00	4.682.500,00	3.716.400,00	33.898.300,00	0,00
3	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	395.097.800,00	90.862.500,00	45.703.000,00	36.013.600,00	222.518.700,00
4	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	178.382.000,00	0,00	3.600.000,00	10.210.000,00	164.572.000,00
5	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	71.618.000,00	9.289.000,00	7.662.400,00	6.615.600,00	48.051.000,00
6	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	15.000.000,00	4.980.000,00	4.980.000,00	5.040.000,00	0,00
Total Anggaran		999.373.000,00	276.628.000,00	195.825.800,00	91.777.500,00	435.141.700,00

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak



Drs. MU'MINUN, M.M

Pemalang, 2 Januari 2025
Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial

YUSTINA DWI MEININGTIAS, SKM, M.Kes



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WALUYO, S.STP, MP**
Jabatan : **Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. MU'MINUN, M.M**
Jabatan : **Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua P**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pemalang, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak

Drs. MU'MINUN, M.M

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana

WALUYO, S.STP, MP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (SUB KEGIATAN)

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Triwulan			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Terlaksananya Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan	Dokumen	1	0	0	0	1
2	Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	Dokumen	1	0	0	1	0
3	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana PKB/PLKB	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Laporan	1	0	1	0	0
4	Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringannya	Laporan	6	0	0	6	0
5	Terlaksananya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	304	0	304	0	0
6	Terlaksananya Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Laporan	1	0	0	1	0

7	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	2	0	0	0	2
8	Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Laporan	10	0	0	0	10
9	Terlaksananya Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Aksektor yang Mendapat Peningkatan Kesertaan KB Pria	Orang	1470	0	1470	0	0
10	Terlaksananya Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi	5	0	0	0	5
11	Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Unit	15	0	0	0	15
12	Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Orang	222	0	0	0	222
13	Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Laporan	4	0	0	0	4

14	Terlaksananya Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Orang	223	0	0	223	0
----	--	---	-------	-----	---	---	-----	---

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB	9.554.057.000,00	1.127.087.193,00	2.664.157.500,00	3.120.086.500,00	2.642.725.807,00
2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00
3	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana PKB/PLKB	119.700.000,00	119.700.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	15.000.000,00	2.353.000,00	2.189.000,00	2.189.000,00	8.269.000,00
5	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang MKJP	108.456.000,00	108.456.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00
7	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00
8	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	5.719.654.000,00	741.763.000,00	733.179.000,00	1.005.049.000,00	3.239.663.000,00
9	Peningkatan Kesertaan KB Pria	195.444.000,00	195.444.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1.314.400.000,00	0,00	1.314.400.000,00	0,00	0,00

11	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor UPPKA	195 000 000,00	6 500 000,00	188 500 000,00	0,00	0,00
12	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor UPPKA	222 000 000,00	222 000 000,00	0,00	0,00	0,00
13	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor UPPKA	425 940 000,00	226 705 000,00	199 235 000,00	0,00	0,00
14	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor UPPKA	31 000 000,00	25 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
Total Anggaran		18.247.651.000,00	2.775.008.193,00	5.324.660.500,00	4.127.324.500,00	6.020.657.807,00

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Drs. MU'MINUN, M.M

Pemalang, 2 Januari 2025
Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana


WALEYO S.STP, MP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
 BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Jumlah
1	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase penyediaan data keluarga dan pembinaan/pen gawasan serta pelaporan KKBP	%	100
2	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Prosentase pelaksanaan advokasi dan KIE KKBPK	%	100
3	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB PKB/PLKB	Prosentase Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) dalam mendukung pelaksanaan kegiatan KB	%	100
4	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase PUS yang mendapat pelayanan KB	%	70,46
5	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB	Prosentase organisasi kemasyarakatan peduli KB	%	100
6	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase desa/kelurahan yang memiliki kelompok Tribina aktif	%	100
7	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kecamatan ng di fasilitasi kemitraan dalam implementasi KKBPK melalui momentum	%	100

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	9.554.057.000,00	1.127.087.193,00	2.664.157.500,00	3.120.086.500,00	2.642.725.807,00
2	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00
3	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB PKB/PLKB	119.700.000,00	119.700.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	6.185.554.000,00	794.031.000,00	739.303.000,00	1.007.238.000,00	3.644.982.000,00
5	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB	1.314.400.000,00	0,00	1.314.400.000,00	0,00	0,00
6	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	873.940.000,00	304.830.000,00	569.110.000,00	0,00	0,00
Total Anggaran		18.247.651.000,00	2.345.648.193,00	5.486.970.500,00	4.127.324.500,00	6.287.707.807,00

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Drs. MU'MINUN, M.M

Pemalang, 2 Januari 2025
Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana


WALUYO, S.STP, MP



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **TRIYATNO YULIHARSO, S.IP, M.P**
Jabatan : **Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. MU'MINUN, M.M**
Jabatan : **Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pemalang, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak


Drs. MU'MINUN, M.M


TRIYATNO YULIHARSO, S.IP, M.P

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (SUB KEGIATAN)

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Triwulan			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	0	1	0	0
2	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan/Kota	Laporan	1	0	1	0	0
3	Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG kewenangan kab/ kota	Jumlah kebijakan teknis penyelenggaraan PUG di tingkat kab/ kota	Kebijakan	1	1	0	0	0
4	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) kewenangan kab/ kota	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	Orang	50	0	0	0	50
5	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan/Kota	Laporan	1	0	1	0	0
6	Terlaksananya Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan PUG Tingkat Kab/Kota	Orang	20	0	0	0	20

7	Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Dokumen	1	1	0	0	0
8	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kab/Kota	Organisasi	36	0	36	0	0
9	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	35	0	35	0	0
10	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	350	0	0	0	350
11	Terlaksananya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	1	0	0	0	1
12	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	0	0	0	1
13	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	50	0	0	0	20

14	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	0	1	0	0
15	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	30	0	30	0	0
16	Terlaksananya Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	0	1	0	0
17	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	65	0	65	0	0
18	Terlaksananya Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	0	1	0	0
19	Terlaksananya Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	0	0	0	1
20	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Mendapat advokasi dan Pendampingan	Lembaga	1	0	0	1	0

21	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kab/Kota Kabupaten/Kota	Orang	115	0	0	0	115
22	Terlaksananya Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kabupaten/Kota	Dokumen	1	0	0	0	1
23	Terlaksananya Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Kabupaten/Kota yang Tersedia	Layanan	1	0	0	0	1
24	Terlaksananya Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	0	2	0	0
25	Terlaksananya Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	0	0	0	1
26	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Organisasi	25	0	0	0	25
27	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	0	0	1	0

28	Terlaksananya Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Organisasi	25	0	0	0	25
29	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	0	1	0	0
30	Terlaksananya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Dokumen	1	0	1	0	0
31	Terlaksananya Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	0	1	0	0
32	Terlaksananya Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah Kegiatan Pencegahan KTA Terpadu	Kegiatan	1	0	1	0	0
33	Terlaksananya Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan dalam Pelaksanaan Kebijakan/program/Kegiatan Pencegahan KTA	Orang	20	0	20	0	0
34	Terlaksananya Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	Dokumen	1	0	0	0	1

35	Terlaksananya Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	20	0	20	0	0
36	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah Anak yang mendapatkan layanan	Orang	80	0	80	0	0
37	Terlaksananya Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Provinsi yang Memiliki Sarana dan Prasarana Layanan Sesuai Standar	Lembaga	2	0	0	0	2
38	Terlaksananya Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan AMPK	Kegiatan	1	0	1	0	0
39	Terlaksananya Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang Terlatih dan Mendapatkan Sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK tingkat daerah kabupaten/	Orang	30	0	30	0	0
40	Terlaksananya Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak	Dokumen	1	0	1	0	0
41	Terlaksananya Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah AMPK yang Memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus	Orang	2	0	2	0	0

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00
3	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG kewenangan kab/ kota	10.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	10.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00
6	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00
7	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00
8	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
9	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00

11	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 000 000,00	10 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	104 250 000,00	104 250 000,00	0,00	0,00	0,00
13	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
14	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
15	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	71 270 000,00	0,00	71 270 000,00	0,00	0,00
16	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
17	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	47 000 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00
18	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
19	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00
20	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	27 000 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00

21	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	96 000 000,00	0,00	0,00	96 000 000,00	0,00
22	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
23	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
24	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
25	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
26	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	52 500 000,00	52 500 000,00	0,00	0,00	0,00
27	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00	0,00
28	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00
29	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
30	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

31	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
32	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
33	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00
34	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
35	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
36	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
37	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
38	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
39	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

40	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
41	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Total Anggaran		896.830.000,00	275.750.000,00	305.270.000,00	294.310.000,00	18.500.000,00

Pemalang, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,

Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Drs. MU'MINUN, M.M

Pihak Pertama,

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

TRİYATNO YULHARSO, S.IP., M.P

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Jumlah
1	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang melaksanakan pengarusutamaan gender	%	95
2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan yang diberdayakan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	%	0,070
3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang dikuatkan dan dikembangkan	%	62
4	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO (N/100 000)	%	7,4
5	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang dikuatkan dan dikembangkan	%	96,5
6	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender KG dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan kualitas keluarga yang dibina dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak	%	100
7	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan keluarga yang dikuatkan dan dikembangkan dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak	%	100
8	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga	%	100
9	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan data gender dan anak	%	62,50

10	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha yang aktif dalam pelembagaan PHA	%	80
11	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dikuatkan dan dikembangkan	%	64,27
12	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga perlindungan khusus anak yang di bina	%	50
13	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak korban kekerasan termasuk TPPO yang melapor dan mendapat layanan komprehensif	%	58,46
14	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang dikuatkan dan dikembangkan	%	80

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	50 000 000,00	20 640 000,00	29 360 000,00	0,00	0,00
2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	22 500 000,00	0,00	22 500 000,00	0,00	0,00
3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	45 000 000,00	0,00	0,00	25 420 000,00	19 580 000,00
4	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	124 250 000,00	15 000 000,00	41 075 000,00	68 175 000,00	0,00
5	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	97 266 000,00	5 000 000,00	12 500 000,00	71 270 000,00	8 496 000,00
6	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender KG dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	72 000 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000 000,00
7	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	133 000 000,00	5 000 000,00	0,00	128 000 000,00	0,00
8	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
9	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00
10	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	152 500 000,00	45 000 000,00	107 500 000,00	0,00	0,00

11	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	16 000 000,00	3 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00
12	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	23 000 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00
13	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	123 310 000,00	0,00	0,00	123 310 000,00	0,00
14	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	18 500 000,00
Total Anggaran		905.326.000,00	96.640.000,00	245.935.000,00	444.175.000,00	118.576.000,00

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Drs. MU'MINUN, M.M

Pemalang, 2 Januari 2025
Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

TRIYATNO YULHARSO, S.IP., M.P



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NURSANTI SETYARINI, SE.,M.M**
Jabatan : **Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. MU'MINUN, M.M**
Jabatan : **Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pemalang, 2 Januari 2025

Pihak Pertama,

Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

NURSANTI SETYARINI, SE.,M.M

Pihak Kedua,

Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak

Drs. MU'MINUN, M.M

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Triwulan			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Terlaksananya Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	2	0	2	0	0
2	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	11	0	11	0	0
3	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Orang	12	0	12	0	0
4	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang Mendapatkan Layanan	Layanan	80	0	0	0	80

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	8 409 200,00	0,00	8 409 200,00	0,00	0,00
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	214 924 800,00	5 940 000,00	20 160 000,00	3 400 000,00	185 424 800,00
3	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	8 496 000,00	0,00	8 496 000,00	0,00	0,00
4	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	120 310 000,00	0,00	0,00	120 310 000,00	0,00
Total Anggaran		352.140.000,00	5.940.000,00	37.065.200,00	123.710.000,00	185.424.800,00

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Drs. MU'MINUN, M.M

Pemalang, 2 Januari 2025
Pihak Pertama,
Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

NURSANTI SETYARINI, SE.,M.M